

**ANALISIS PENERAPAN POLA KREDIT KOPERASI PRIMER  
ANGGOTA (KKPA) PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KECAMATAN  
TANDUN KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2010-2012**

**(NthaAulia@yahoo.com)**

**Oleh : Nita Aulia** atas bimbingan **Drs. H. Ishak M.Si**

***ABSTRACT***

The research is entitled “ The Analysis of the Application of Members Primary Credit Co-operation Program in Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu in 2010-2012” The KKPA program is one of the democratic economic program intended to increase the prosperity of local population. Thus in the application the teamwork among companies, co-operative and local people is required under the surveillance of local government and people’s regional representative council (DPRD)

To achieve the goal in applying the program a proper surveillance and financial transparency is required. The research question are how is the analysis of the application of this KKPA program and what obstacles would be faced during the application. The objectives of the research are to find out how the program would be applied and what obstacles would be faced. The scope of this research is descriptive. The data was collected from the field and direct interview with authorized spoke person.

Based on the finding it was concluded that the application of KKPA program was still not proceeded in a proper way. It could be seen from the obstacles faced by various parties and also lack surveillance and financial. Transparency in the application of thid program. Based on those problem. The writer concluded that the aim of the program is not entirely reached.

**Keyword : Members Primary Credit Co-operative Program (KKPA Program), Economy and Development**

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Salah satu program ekonomi kerakyatan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat adalah pola kredit koperasi primer anggota (KKPA) yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat terutama dibidang ekonomi. Tentu saja pola ini dilaksanakan oleh beberapa pihak yang terkait seperti koperasi dan perusahaan yang bermitra. Di kabupaten Rokan Hulu khususnya di kecamatan Tandun pola kredit koperasi primer anggota (KKPA) ini belum terlihat signifikan membantu perekonomian masyarakat setempat.

Hal ini terlihat dengan pendapatan masyarakat yang masih tergolong rendah dan dianggap belum mampu mensejahterakan perekonomian masyarakat serta

adanya kendala-kendala yang dihadapi berbagai pihak yang ikut dalam pelaksanaan pola ini.

## **1.2 Tinjauan Pustaka**

### **a. Studi Terdahulu**

1. Perumusan kebijakan harus dilandasi dengan pengetahuan atau kondisi social ekonomi rakyat, potensi, permasalahan dan kemungkinan-kemungkinannya. Menurut Bintaro dalam kebijakan kita harus memilih-milih masalah dengan berbagai alternatif-alternatif fundamental, seperti :

- a) Kebijakan dalam tujuan ditekankan laju pertumbuhan yang tinggi atau kepada keadilan social
- b) Kebijakan ekonomi ditekankan pada peningkatan produksi dan produktifitas atau kepada perluasan kesempatan kerja
- c) Kebijakan dalam pembangunan ditekankan pada daerah-daerah tertentu yang mempunyai potensi pembangunan besar atau pemerataan pembangunan diberbagai daerah
- d) Kebijakan dalam industry ditekankan pada orientasi ekspor atau berorientasi pasar dalam negeri.

Seorang pemimpin dalam pemerintahan harus mampu memutuskan suatu kebijakan. Karena jika seorang pemimpin pemerintahan tidak mampu memutuskan kebijakan maka aparatur pemerintahannya akan sewenang-wenang mempergunakan jabatannya untuk kepentingan individu. Menurut Bintaro proses analisa dan pembentukan kebijakan pemerintahan dapat dibagi dalam tahap-tahap yaitu :

- a) Penyusunan konsep pertama dari suatu kebijakan
- b) Rekomendasi dari suatu kebijakan
- c) Analisa kebijakan dimana berbagai informasi penelaahan dilakukan terhadap adanya rekomendasi suatu kebijakan
- d) Perumusan kebijakan yang sebenarnya
- e) Pengambilan keputusan atau persetujuan formil terhadap suatu kebijakan
- f) Evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Dengan adanya tahap-tahap proses analisa kebijakan tersebut maka dapat dicari pola arus, hubungan antar lembaga serta koordinasi pada masing-masing tahap itu dilakukan oleh berbagai orang atau lembaga. Dengan cara seperti ini dapat dilihat lembaga atau orang mana yang menjadi strategis dalam proses analisa dan pembentukan kebijakan.

### **2. Implementasi kebijakan**

Menurut Syaekuni (2005:43) implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakannya kepada masyarakat sehingga kebijaksanaan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian tersebut mencakup:

- a) Persiapan seperangkap peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut
- b) Menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut

- c) Bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara konkret kemasyarakatan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat dicapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan public maka ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivatif atau turunan dari kebijakan public tersebut (Riant Nugroho, 2003:158)

Sejalan dengan pendapat Jonas Charles (dalam Nashir Budiman, 1991:112) menetapkan ada 6 variabel yang menentukan dalam implementasi kebijakan, antara lain :

- a) Standard dan tujuan (policy standars objectives)
- b) Sumber daya kebijakan (policy resources)
- c) Aktivitas pengamatan dan komunikasi inter organisasional
- d) Karakteristik pelaksanaan
- e) Kondisi ekonomi, social dan politik
- f) Disposisi dan sikap pelaksana.

#### **b. Konsep Teori**

- a) Evaluasi (penilaian) didefinisikan sebagai proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan nyatanya dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai.

Evaluasi kebijakan publik menurut Wahyudi (2002:186) memiliki 4 fungsi:

- 1) Eksplanasi
- 2) Kepatuhan
- 3) Audit
- 4) Akunting

Sedangkan menurut Sulistyani (2004:254) ada lima langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu :

- 1) Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
- 2) Analisis terhadap masalah
- 3) Deskripsi dan standarisasi kegiatan
- 4) Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi
- 5) Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari perubahan tersebut atau karena penyebab yang lain
- 6) Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak

- b) Pengawasan menurut Mockler (dalam Certo dan Certo, 2006:4800) konsep pengawasan menekankan pada tiga hal :

- 1) Harus adanya rencana, standart atau tujuan sebagai tolak ukur yang ingin dicapai
- 2) Adanya proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan

- 3) Adanya usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standat, rencana atau tujuan yang telah ditetapkan
  - 4) Melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan
- Dengan demikian konsep dari mockler ini terlihat bahwa ada kegiatan yang perlu direncanakan dengan tolak ukur berupa kriteria, norma-norma dan standard kemudian dibandingkan, mana yang membutuhkan koreksi ataupun perbaikan-perbaikan.

c) Kebijakan

Menurut Ryaas Rasyid (2000:59) kebijakan pemerintah merupakan konsekuensi dari fungsi pemerintahan dan memiliki tiga fungsi yang hakiki dari pemerintahan, yaitu :

- 1) Pelayanan (service) akan membuahkan keadilan dalam masyarakat
- 2) Pemberdayaan ( empowerment) akan mendorong kemandirian masyarakat
- 3) Pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat

Sedangkan menurut Hasel Nogi (2003:3) pembuatan kebijakan yang baik dapat dilakukan dengan cara :

- 1) Kebijakan harus relevan terhadap kebutuhan masyarakat
- 2) Kebijakan harus memiliki alternative pemecahan masalah
- 3) Kebijakan harus mempunyai tujuan yang jelas
- 4) Kebijakan harus memiliki evaluasi pelaksanaan

d) Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dan Kemitraan

Menurut Zulkarnain ( 2003:7) implementasi dari konsep Ekonomi Kerakyatan adalah wujud dari kesiapan terhadap program yang telah disusun dan harus dilaksanakan secara konsekuen.

Sedangkan kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.

Menurut Zulkarnain (2003:1660 secara teoritis terdapat beberapa bentuk pola kemitraan :

- 1) Pola kemitraan inti plasma
- 2) Pola kemitraan subkontrak
- 3) Pola kemitraan dagang umum
- 4) Pola kemitraan waralaba

### 1.3 Permasalahan Penelitian

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada latar belakang bahwa pola Kredit Koperasi primer Anggota dicanangkan oleh pemerintah pusat dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat setempat terutama dibidang perekonomian maka dapat dirumuskan pertanyaan dari penelitian sebagai adalah :

1. Bagaimanakah penerapan pola koperasi kredit primer anggota (KKPA) di kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pola kredit koperasi primer anggota (KKPA)?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Untuk menganalisis data tentang penerapan pola kredit koperasi primer anggota (KKPA) serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penerapan pola kredit koperasi primer anggota di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.

### **2. METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bermaksud mencari fakta sebanyak-banyaknya yang kemudian diambil suatu kesimpulan (Winarno Surakhmad, 1989:143) serta penguraian penulisan ini dengan cara deskriptif yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi atau kejadian-kejadian (Suryabrata, 1983:18).

#### **2.1 Teknik Pengumpulan Data**

- a. wawancara, melakukan Tanya jawab secara lisan terhadap responden yang telah ditetapkan dengan sejumlah pertanyaan yang tentunya berhubungan dengan masalah penelitian
- b. observasi, digunakan untuk memperoleh data dan informasi langsung yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengawasi gejala-gejala atau masalah-masalah yang ada dilapangan
- c. dokumentasi, sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan didalam bahan yang membentuk dokumentasi (Moleong, 2005:217).

#### **2.2 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan menguraikan hasil-hasil penelitian berupa pengamatan langsung, wawancara maupun data lain yang kemudian dijabarkan sesuai dengan hasil penelitian dan yang terjadi di lapangan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Tahap Pembangunan kebun KKPA**

Tahapan pembangunan kebun KKPA meliputi :

##### **1. Masa Konstruksi**

- a. Masa persiapan meliputi kegiatan : (pengurusan legalitas dan perencanaan)
  - 1) Permohonan ijin prinsip dari menteri pertanian melalui direktorat jendral perkebunan
  - 2) Permohonan percadangan lahan kepada gubernur kepala daerah tingkat I
  - 3) Survey pendahuluan
  - 4) Permohonan pelepasan kawasan hutan kepada menteri kehutanan
  - 5) Studi kelayakan dan perencanaan proyek
  - 6) SK menteri pertanian tentang pelaksanaan proyek dan penunjukan perusahaan inti.
- b. Masa pembangunan fisik kebun

- 1) Pembangunan fisik kebun sepenuhnya dilaksanakan oleh perusahaan inti sesuai dengan standard fisik yang telah ditentukan jendral perkebunan
  - 2) Pemanfaatan petani peserta sebagai tenaga kerja juga bertujuan untuk membina petani peserta tersebut mempunyai kemampuan untuk mengelola kebun plasma nantinya
  - 3) Keberhasilan suatu proyek plasma sangat bergantung dari pembangunan fisik kebun yang baik guna menjamin penyerahan kebun yang tepat waktu dan produksi tinggi
  - 4) Membangun fasilitas pabrik untuk menampung hasil produksi inti dan plasma.
2. masa penyerahan kebun sampai pelunasan kredit
- a. persiapan penyerahan kebun dilaksanakan sejak tanaman berumur 30 bulan s/d 48 bulan, yaitu :
    - 1) pengukuran kavling
    - 2) Pembentukan kelompok tani
    - 3) Undian blok/ kavling
    - 4) Penilaian awal fisik kebun
    - 5) permohonan penilain teknis
    - 6) Penilaian teknis akhir kebun
    - 7) pembentukan sertifikat
  - b. masa penyerahan kebun
    - 1) perjanjian kerjasama antara inti, KUD, kelompok tani dan bank
    - 2) penyuluhan terpadu oleh TP3D1 dan TP3D2
    - 3) pelaksanaan alih kebun atau akan kredit
3. masa pelunasan kredit
4. masa pasca kredit lunas.
- 3.2 Peran Pemerintah Daerah dalam Penerapan Pola KKPA
- 3.2.1 Dinas Perkebunan kabupaten Rokan Hulu  
Melakukan sosialisasi atau himbauan berupa rapat kepada pihak perusahaan dan koperasi guna membahas apa saja yang terkait kendala-kendala dalam penerapan pola KKPA dan memebrikan laporan terhadap hasil penerapan pola KKPA pertahunnya.
  - 3.2.2 Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rokan Hulu  
DPRD merupakan badan yang memiliki tugas dan fungsi dimana berwenang dalam pengawasan/kontroling. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan DPRD Kabupaten Rokan hulu dalam penerapan pola KKPA adalah mendata apa saja permasalahan serta menerima aspirasi-aspirasi yang masuk sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dan perbaikan untuk kedepannya.
- 3.3 Kendala yang dihadapi dalam Penerapan pola KKPA
- Secara keseluruhan kendala yang dihadapi dalam penerapan pola KKPA adalah :
- 1) Koordinasi yang tidak berjalan dengan baik antar pihak-pihak yang terkait
  - 2) Kurangnya pengawasan dalam penerapan pola KKPA

- 3) Kurangnya kesadaran sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas  
Perincian kendala-kendala yang dihadapi oleh berbagai pihak yang menerapkan pola KKPA adalah sebagai berikut:

a. KUD Tandun Sibuyayo

Kendala yang dihadapi bagi pihak KUD Tandun Sibuyayo adalah besarnya desakan masyarakat dalam penerimaan fee/pendapatan setiap bulannya dan tidak sesuai dengan presedural yang semestinya sehingga berdampak menumpuknya hutang kepada pihak bank. Penerimaan fee/pendapatan berdasarkan tahap kebun KKPA

No	Tahap	Luas (Ha)	Pendapatan masyarakat (Rp)
1	Tahap I	299.99	450.000,-
2	Tahap II	189.90	200.000,-
3	Tahap III	189.90	140.000,-
Jumlah		665.14	

Sumber : KUD Tandun Sibuyayo 2013

Sedangkan hutang KUD Tandun Sibuyayo yang sampai sekarang belum terlunasi kepada pihak bank adalah :

No	Tahap	Hutang Koperasi (Biaya Investasi)
1	Tahap I	Rp. 6.201.037.056,-
2	Tahap II	Rp. 6.855.723.844,-
3	Tahap III	Rp. 7.160.771.353,-
Jumlah		Rp. 20.217.532.253,-

Sumber : KUD Tandun Sibuyayo 2013

b. PT. Perkebunan Nusantara V

Kendala yang dihadapi PT. perkebunan Nusantara V lebih kepada lapangan. Berdasarkan data yang diminta kepada pihak PTPN V kendala yang dihadapi sebagai berikut :

1. Kesesuaian lahan

Penilaian kesesuaian lahan adalah tahapan penelitian lahan untuk suatu tujuan penggunaan tertentu lahan tersebut dimana faktor-faktor pembatas penggunaan lahan diidentifikasi berikut cara-cara mengatasinya untuk mencapai produktifitas lahan yang optimal. Sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang disebut faktor pembatas antara lain mencakup curah hujan, ketinggian diatas permukaan laut, bentuk daerah atau topografi dan jenis tanah serta sifat-sifatnya. Kesesuaian lahan actual adalah kesesuaian lahan untuk penggunaan yang hanya berdasarkan pada kondisi alami tanpa adanya penambahan input teknologi maupun pengolahan lahan.

Beberapa usaha yang mungkin dapat dilakukan untuk menghilangkan atau paling tidak menekankan/mengurangi pengaruh buruk dari faktor-faktor pembatas tadi antara lain sebagai berikut :

- 1) Perbaiki tingkat kesuburan tanah (ketersediaan unsur hara) dilakukan melalui pemupukan yang rasional dan berkesinambungan termasuk pengapuran untuk memperbaiki Ph tanah

2) Penambahan bahan organik pada tanah-tanah yang bertekstur kasar untuk memperbaiki kesaranagan, struktur dan konsistensi tanah.

2. Pemeliharaan

Pelaksanaan pemeliharaan tanaman kelapa sawit yang dilakukan meliputi pemberantasan gulma, buru lalang, perawatan piringan, perawatan gawangan, pemupukan, pengaturan, drainase serta pemberantasan hama penyakit. Secara umum kondisi pemeliharaan yang tercermin dari kondisi gawangan dan purungan tanaman tampak cukup bersih namun disebagian areal masih terjadi keterlambatan rotasi. Pemupukan yang diberikan cukup efektif. Hal ini terlihat dari tingkat pertumbuhan tanaman dalam satu blok terlihat umbuh naik merata dan vigur tanaman terlihat sehat.

c. Pemerintah Daerah

Kendala yang dihadapi pihak pemerintah daerah adalah kurangnya kesadaran dari pihak perusahaan dan koperasi untuk memberikan laporan hasil penerapan pola KKPA pertahunnya.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **4.1 Kesimpulan**

1. Pola KKPA di Kabupaten Rokan Hulu khususnya di Kecamatan tandun masih dianggap belum belum mencapai tujuan yang semaksimal mungkin karena belum terlihatnya kesejahteraan masyarakat terutama disektor perekonomian secara signifikan

2. Tidak adanya laporan pertahun yang diberikan pihak perusahaan dan koperasi kepada pemerintah daerah merupakan salah satu kendala dalam pengawasan penerapan pola ini serta tidak adanya badan khusu dari pemerintah daerah yang berwenang dalam pengawasan pola KKPA ini.

##### **4.2 Saran**

1. harus terciptanya koordinasi yang baik antara pihak-pihak yang berperan dalam penerapan pola ini. Ketransparanan serta pengawasan merupakan hal yang dibutuhkan agar pola KKPA ini berjalan dengan baik sehingga mencapai tujuan kesejahteraan dan pertumbuhan perekonomian rakyat

2. adanya kesadaran baik antara pihak individu maupun dalam sebuah kelembagaan dalam penerapan pola ini sehingga satu sama lain terciptanya kerjasama yang baik tanpa menguntungkan salah satu pihak saja.

##### **Ucapan Terimakasih**

Terselenggaranya penelitian ini tidak terlepas dari adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini. Bantuan baik berupa moril maupun materil.

1. Ucapan terimakasih kepada bapak Abu Nawas selaku pihak Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu, Bapak adriyanus selaku sekretaris KUD Tandun Sibuyo dan pihak PT. Perkebunan Nusantara V.
2. Ucapan terimakasih tak terhingga kepada Bapak Drs. H. Ishak, M.Si selaku pembimbing penelitian dan pembimbing akademis yang telah memberikan saran dan meluangkan waktu dalam penelitian ini.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

Nugroho, Rian. 2003. Reinventing Pembangunan. Jakarta : Elex Media Komputindo

Rasyid, Ryaas. 2000. Makna Pemerintahan, Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan. Jakarta. PT. Agromedia Pustaka

Sulistiyani , 2004. Memahami Good Government : Dalam Perspektif SDM, Yogyakarta, Gava Media

Syaukuni. 2005. Kebijakan Publik. Jakarta : Citra Utama

Wahyudi, Kumorotomo, dkk. 2002. System Informasi Manajemen. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta

Zulkarnain. 2003. Membangun Ekonomi Rakyat . Yogyakarta . Adicita Karya Nusa